

Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring

Dina Listiorini, Donna Asteria, Irwan Hidayana

Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Email: dinalisty@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the hate speech discourse of the Indonesian government on online media, namely republika.co.id, viva.co.id, tempo.co, and kompas.com, using Sara Mill's discourse analysis approach. The study shows minority group of LGBT has never been treated as media subject but, instead, as marginalized objects due to the government predominating LGBT discourse. These findings are indicated by: first, the hate speech constructed by stereotype, stigma, and religious-based heteronormative values; second, lack of knowledge about sexuality, particularly on LGBT, among journalists; third, hate words being a part of the power of suppressing heteronormative ideology distributed through online media.*

Keywords: *discourse, hate speech, homophobia, LGBT, online news*

Abstrak: *Artikel ini membahas tentang diskursus ujaran kebencian pemerintah Indonesia di media daring di tahun 2016 dengan pendekatan analisis diskursus Sara Mills. Media daring yang dipilih adalah republika.co.id, viva.co.id, tempo.co, dan kompas.com. Hasil riset menunjukkan bahwa kelompok minoritas LGBT tidak pernah menjadi subjek media dan hanya menjadi objek yang dipinggirkan karena dominasi pemerintah atas diskursus tentang LGBT. Temuan ini ditunjukkan melalui tiga hal: pertama, ujaran kebencian dibangun oleh stereotip, stigma, dan nilai heteronormative berbasis agama; kedua, kurangnya pengetahuan di kalangan jurnalis tentang seksualitas, terutama LGBT; ketiga, kata-kata kebencian menjadi bagian dari kekuasaan ideologi heteronormative yang menindas dan didistribusikan melalui media daring.*

Kata Kunci: *berita daring, diskursus, homofobia, LGBT, ujaran kebencian*

Sejak akhir Januari 2016, kelompok minoritas seksual lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT) mendapat tekanan melalui pemberitaan media massa. Hal ini bermula ketika sebuah kelompok studi seksualitas bernama *Support Group and Resource Centre on Sexuality* Universitas Indonesia (SGRC UI) mengumumkan program pendampingan terhadap LGBT (Oktara, 2016). Meskipun pada awalnya kasus tersebut merupakan kasus administratif antara SGRC UI dengan

pihak Universitas Indonesia, namun dampaknya justru dirasakan oleh kelompok LGBT melalui pemberitaan media, terutama media dalam jaringan (*daring*).

Tabel 1 menunjukkan beberapa contoh judul berita yang diambil secara acak dari berbagai media daring sepanjang 2016 pascakasus SGRC UI.

Pada tahun 2016, berita di media massa, terutama berita daring, dipenuhi dengan ujaran kebencian (*media backlash*) yang menghantam LGBT. Tabel 1 menunjukkan

Tabel 1 Daftar Judul Berita Media Daring Bertopik LGBT Pada 2016

Bulan	Media	Judul
Januari	<i>beritagar.id</i>	Menteri Nasir Kecam Komunitas LGBT di Universitas Indonesia (25/1)
Februari	<i>tribunnews.com</i>	Menhan Anggap LGBT Bahaya (24/2)
Maret	<i>tempo.co</i>	Zulkifli Hasan: LGBT Merusak Moral Bangsa (9/3)
April	<i>republika.co.id</i>	DPR: Menentang LGBT Juga Termasuk Hak Asasi (18/4)
Mei	<i>suara.com</i>	LSM Tolak Terapi Konversi bagi LGBT
Juni	<i>okezone.com</i>	Wamenlu: Indonesia Tidak Mungkin Terima Paham LGBT (1/6)
Juli	<i>viva.co.id</i>	Fahira Idris Laporkan Aktivistis LGBT ke Bareskrim (25/7)
Agustus	<i>liputan6.com</i>	Pelaku Prostitusi Online Anak untuk <i>Gay</i> Berperilaku Menyimpang (31/8)
September	<i>kompas.com</i>	Pemerintah Minta Google Blokir Aplikasi LGBT (16/9)
Oktober	<i>antaranews.com</i>	KB PII: Komunisme dan LGBT Ancam Bangsa (27/10)
November	<i>news.detik.com</i>	Tentukan Nasib LGBT, MK Torehkan Sidang Terpanjang (16/11)
Desember	<i>bbc.com/indonesia</i>	MK Tolak Kriminalisasi LGBT dan Hubungan di Luar Nikah (14/12)

Sumber: Olahan Peneliti

luapan pemberitaan tentang LGBT yang terjadi tahun 2016. Berbagai hal tentang LGBT dibahas dari beragam topik, sudut pandang, dan kepentingan, tetapi mayoritas berita tersebut bermuara pada satu arah, yakni menyudutkan LGBT. Penyudutan ini dilakukan dengan memberikan stigma, seperti memiliki perilaku menyimpang; dianggap “sakit”, sehingga perlu disembuhkan; melanggar moral agama dan norma masyarakat, sehingga perlu diluruskan dan dibina; serta abnormal dan berdosa, sehingga tidak pantas hidup di Indonesia dan harus ditekan perkembangannya.

Media daring memiliki peran yang cukup besar dalam penyebaran ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas seksual tahun 2016. Media daring merupakan media yang populer di Indonesia dan mulai berkembang sejak tahun 1995-1996 (Hill & Sen, 2005, h. 1). Hingga kini, media daring menjadi salah satu bagian dari perkembangan media di Indonesia, baik media yang menjadi bagian dari industri media papan atas maupun tidak.

Suryakusuma (2016) mengatakan bahwa sumber kebencian kepada LGBT dimulai dari pernyataan para pemimpin negara dan merembet ke komisi-komisi negara dan berbagai lembaga lainnya. Hal yang sama juga dinyatakan *Human Right Watch* (2016, h. 1) dalam laporan berjudul “Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami: Komunitas LGBT Indonesia dalam Ancaman”. Laporan tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen pemerintah dan institusi agama yang gencar menyuarakan kebencian dan ancaman terhadap kelompok LGBT di Indonesia, yaitu komisi negara, kaum islamis militan, dan organisasi keagamaan arus utama. *Human Right Watch* (2016, h. 3) menganggap bahwa negara gagal menegakkan komitmen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Bahkan negara telah mengipasi api kebencian melalui serangkaian peraturan dan rancangan perundang-undangan.

Abainya negara dalam kasus LGBT ini sebetulnya sudah diungkapkan dalam laporan *United Nations Development Programme* dan *United States Agency*

for International Development (UNDP-USAID) yang berjudul “Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report” (UNDP-USAID, 2014, h. 23). Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah cenderung tidak peduli pada upaya-upaya masyarakat sipil yang menentang berbagai peraturan daerah (perda) syariah yang mengatur perbuatan seksual atau cara berpakaian.

Ujaran kebencian terhadap LGBT tahun 2016 diawali dengan pernyataan Menteri Riset dan Teknologi (menristek), Mohammad Nasir, tanggal 24 Januari (Awigra, 2016) yang mengatakan bahwa kelompok LGBT dilarang masuk kampus karena dapat merusak moral bangsa, mengingat kampus adalah institusi penjaga moral yang semestinya menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Pernyataan menristek ini selanjutnya diikuti oleh pernyataan tentang LGBT dari berbagai elemen pemerintahan, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang mengatakan bahwa LGBT dilarang masuk kampus (Sutrisno, 2016).

Pada waktu yang sama, *Harian Republika* menurunkan berita utama dalam edisi cetak berjudul “LGBT Ancaman Serius” (Novia & Jamil, 2016). Berita utama Republika ini membuat Republika disomasi oleh forum lesbian, *gay*, *bisexual*, transgender, *intersex*, dan *queer* (LGBTIQ) Indonesia. Melalui surat somasi tertanggal 29 Januari 2016 tersebut, Yuli Rustinawati, koordinator nasional Forum LGBTIQ Indonesia, menolak judul berita utama di *Harian Republika* yang terbit pada hari Minggu 24 Januari 2016 tersebut.

Forum LGBTIQ Indonesia menilai bahwa judul berita tersebut tidak didasarkan pada argumen yang kokoh dan tidak memuat pendapat narasumber dari kelompok LGBT atau ahli yang dapat memberikan penilaian netral. Yuli Rustinawati menganggap bahwa cara pemberitaan tersebut melanggar kode etik jurnalistik (Satria & Purwadi, 2016).

Pembahasan mengenai tindakan diskriminatif terhadap LGBT juga dilakukan oleh Boellstorff (2016) yang mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya melontarkan ujaran kebencian di media, tetapi juga melakukan tindakan diskriminatif. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah terlihat misalnya pada saat kepolisian Surabaya tidak memberikan perlindungan keamanan pada sebuah acara yang dilakukan oleh GAYa Nusantara, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan advokasi terhadap LGBT (Halim & Harsaputra, 2016).

Tindakan lain yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah memblokir tiga aplikasi kencan *gay*, yaitu *Grindr*, *Blued*, dan *BoyAhoj*, dengan alasan ketiga aplikasi tersebut mengandung konten seksual yang menyimpang (Bastian, 2016). Pemblokiran ketiga aplikasi tersebut berdampak pada terhambatnya penanggulangan penyebaran *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) karena pemanfaatan aplikasi tersebut selain menghubungkan individu LGBT di seluruh Indonesia, juga berfungsi untuk menyebarkan materi kesehatan seksual (Listiorini & Davies, 2017).

Produk hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas seksual sejauh ini hanya ada pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia/Kapolri (SE/6/X/2015) tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa ujaran kebencian ini bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, termasuk orientasi seksual (poin 2 (g) no. 11) di mana penyebarannya dapat dilakukan di antaranya melalui media massa cetak atau elektronik (poin 2 (h) no 6).

Tema LGBT bukan hal baru dalam pemberitaan media di Indonesia. Data digital *Harian Kompas* cetak menunjukkan bahwa pemberitaan tentang LGBT sudah ada sejak 4 Agustus 1968 dengan berita berjudul “Di Djakarta Terdapat 15.000 Bantji” (Kompas, 1968). Berita tersebut mengisahkan pertemuan Gubernur Ali Sadikin dengan delegasi “bantji” yang diketuai oleh Lidya. Berita tersebut bernada positif karena mengutip pernyataan gubernur yang mengatakan bahwa “bantji” memiliki hak sama sebagaimana warga Jakarta lainnya yang hak-hak sosialnya perlu dilindungi.

Perkembangan pemberitaan selanjutnya terkait LGBT adalah ketika terjadi kasus kriminal, yaitu perkosaan terhadap anak laki-laki pada kasus Robot Gedek tahun 1996 (Alwie, Anthony, Larasati, & Pamungkas, 2007); pembunuhan berantai pada kasus Very Idham Heryansyah atau Ryan tahun 2008 (Alwie, Barus, Taolin, & Sujatmiko, 2008); dan kasus Mujiyanto yang membunuh 15 orang teman kencannya tahun 2012 (Wasono,

Ishomudin, Goretti, & Eni S., 2012). Pemberitaan yang muncul dan komentar dari para pejabat pemerintahan pada kasus-kasus tersebut tidak segencar pemberitaan dan komentar tahun 2016 dan juga tidak disertai dengan ujaran kebencian.

Indonesia bukan satu-satunya negara di mana pemerintahnya melakukan ujaran kebencian yang dimuat di media massa. Hal yang kurang lebih sama dialami oleh komunitas *gay* di Inggris tahun 1953. Pemerintah Inggris melalui *Sydney Morning Telegraph* menyatakan bahwa *gay* selain tidak diperkenankan bekerja di instansi pemerintah karena dianggap beresiko dalam hal keamanan, juga harus dibasmi (Pullen, 2012, h. 59-60). Pemberitaan LGBT di Amerika Serikat tahun 1990-an juga masih memiliki kebencian terhadap *gay* dan lesbian yang terlontar dari pernyataan beberapa politisi pemerintahan negara bagian, seperti anggota Dewan Kota San Diego yang mengatakan bahwa dirinya “suka melihat semua *gay* dimasukkan ke dalam kamar gas” (Perry, 2001, h. 188).

Selain itu, dua negara di Afrika, yakni Afrika Selatan dan Uganda, melalui kepala negaranya mengungkapkan ketidaksukaan mereka terhadap homoseksual. Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, mengatakan bahwa perkawinan sesama jenis adalah tabu dan tidak mendapat toleransi di masyarakat manapun di dunia. Sedangkan presiden Uganda, Musevani, mengatakan bahwa homoseksual sebagai hal yang menjijikkan (*disgusting*) dan Musevani pun menandatangani berlakunya hukum yang mengkriminalkan homoseksual (Tettey, 2016, h. 87).

Seksualitas di Media

Seksualitas adalah isu yang menarik untuk diulas di media, terutama dalam konteks seksualitas profan atau seksualitas yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pemberitaan tentang seksualitas di media lebih menekankan pada kontroversi moralitas, terutama bila menyangkut *ketubuhan* perempuan atau moralitas *ketubuhan* manusia. Media memiliki fungsi penting di masyarakat dalam menampilkan realitas kelompok minoritas. De Jong (2006, h. 38) mengemukakan dua alasan realitas kelompok minoritas ditampilkan di media. Pertama, media mengonstruksi realitas sosial. Kedua, media mampu memarginalkan kelompok minoritas tertentu karena kemampuannya untuk melanggengkan stereotip.

Greer (2003, h. 14), dalam konteks ini, mengemukakan bahwa peran media sebagai jendela dunia memilih pihak yang eksis maupun tidak eksis melalui proses seleksi, pihak yang dimunculkan atau didiskusikan, dan pihak yang tidak tampil di media arus utama, serta seperti apa pihak-pihak tersebut ditampilkan. Misalnya, pemberitaan media di Amerika Serikat tahun 1950 hingga 1990-an merepresentasikan *gay* dan lesbian sebagai individu dengan seks menyimpang, kriminal, subversif, dan membahayakan keamanan nasional; atau ketika tahun 1950, bagaimana *gay* sering ditampilkan sebagai individu yang sangat terawat, berkulit putih, dan berasal dari kelas menengah. Hal tersebut tentu saja akan membungkam narasi tentang *gay* yang tidak berkulit putih, tidak kaya, atau bekerja sebagai buruh (Greer, 2003, h. 115).

Studi tentang ujaran kebencian atau *hate speech*, misalnya di beberapa negara Eropa, menunjukkan fakta bahwa konsep ujaran kebencian tidak mudah untuk didefinisikan karena berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga makna ujaran kebencian maupun kejahatan karena kebencian (*hate crime*) menjadi berbeda pula (Garland & Chakraborti, 2012, h. 39). Sedangkan Herdt (2009, h. 26) mengemukakan bahwa beberapa pakar melihat kebencian atau ketakutan terhadap LGBT pada dasarnya berasal dari kelompok fundamentalis dan konservatif yang kehilangan akar keragaman dan inklusivitas seksualitas yang berdampak luas secara sistemik. Kelompok fundamentalis bereaksi dengan meningkatkan rasa takut, kebencian, kemarahan, dan rasa jijik dengan cara-cara yang mendorong agenda mereka ke dalam arena sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

Sementara itu, Perry (2001, h. 185) mengemukakan bahwa ekspresi politis terkait kebencian dan kefanatikan bisa muncul di manapun, seperti melalui pemberitaan, sidang pengadilan, kampanye politik, dan perdebatan di Dewan Perwakilan. Kelompok minoritas “dijadikan setan” (*to be demonized*) dan diperkuat oleh diskursus gender dan rasial, seperti diskursus di Amerika yang membentuk intoleransi terhadap tiga kelompok yang paling banyak mendapatkan fitnah, yaitu Afro Amerika, homoseksual, dan imigran.

Diskursus dan Pengetahuan

Diskursus adalah produksi pengetahuan melalui bahasa yang dihasilkan dari praktik diskursif yang menghasilkan makna dan

memengaruhi semua praktik-praktik sosial (Hall, 1992, h. 291). Diskursus adalah cara berbicara, berpikir, atau mewakili topik yang menghasilkan pengetahuan tertentu yang bermakna dan dibangun melalui berbagai diskursus lain yang tidak hanya mempelajari dan menggambarkan tentang hal tersebut, tetapi juga mengaturnya (Arthur, 2004, h. 6). Pada praktik diskursus, media kerap dikaitkan dengan produksi pengetahuan.

Pembicaraan atau diskursus mengenai LGBT menjadi hal yang menarik dan kontroversial dalam media massa, salah satunya karena LGBT dianggap sebagai ancaman terhadap hal-hal yang dianggap “alami”. Istilah minoritas juga tidak lagi berkisar pada etnis, ras, atau perempuan (dalam konteks ketidakberdayaan), namun juga pada *gay* dan lesbian. Gunter (2001, h. 13) mengemukakan bahwa hal ini menjadi wajar ketika sistem politik dan budaya masyarakat cenderung memandang konsepsi feminin dan maskulin dalam tataran atribut “normal”, “natural”, dan “bermoral” seperti konsepsi yang diajarkan sejak kecil, sehingga laki-laki *gay* dan perempuan lesbian dianggap tidak wajar.

Diskursus tentang LGBT adalah bagian dari diskursus seksualitas. Pada diskursus mengenai seksualitas, terdapat dua konsep penting yang tidak dapat diabaikan, yakni kekuasaan dan ideologi dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dikaitkan terutama pada tubuh dan menyebabkan munculnya relasi kuasa dari pihak-pihak otoritas tertentu atas pihak lain. Institusi atau lembaga adalah tempat bekerjanya kekuasaan yang diskursif. Menurut Foucault (dalam Mayr, 2008, h. 8), diskursus

bukan bagian dari teks, namun sebagai praktik yang secara sistematis membentuk objek yang mereka bicarakan. Diskursus merupakan sekumpulan pernyataan yang membicarakan topik tertentu melalui bahasa dan hal tersebut mewakili pengetahuan atas topik-topik tertentu dan mengonstruksi sebuah topik. Praktik diskursus juga membahas mengenai bahasa yang memegang peran penting karena diskursus memproduksi pengetahuan melalui bahasa (Hall, 1992, h. 291).

Konsep diskursus Sara Mills pada dasarnya banyak mengacu pada pemikiran Michel Foucault. Menurut Mills, Foucault adalah salah seorang pemikir yang dianggap penting dalam perkembangan teori kritis, terutama dalam studi posmodernisme (Mills, 2004, h. 53). Pembahasan LGBT, dalam konteks diskursus, meletakkan isu ini pada tataran diskursus seksualitas yang melibatkan relasi kuasa di dalamnya. Foucault menjadikan seksualitas sebagai salah satu subjek yang ditulisnya, selain subjektivitas, kegilaan, disiplin tubuh, dan bahasa (Mills, 2004, h. 15).

Foucault (dalam Mills, 2004) membahas konsep diskursus selalu berkaitan dengan kuasa dan pengetahuan yang berujung pada diskursus mana yang dominan dan diskursus mana yang terpinggirkan. Oleh karena itu, Mills mencoba menjelaskannya secara lebih terstruktur pada posisi subjek dan objek (Mills, 2004, h. 82), serta posisi pembaca pada media (Eriyanto, 2011, h. 211). Konsep subjek dan objek ini memperjelas konsep relasi kuasa Foucault. Menurut Foucault, kekuasaan bukan merupakan hubungan subjektif yang searah, namun

menyebar di mana-mana (*omnipresent*) dalam konstruksi pengetahuan yang terbentuk dalam diskursus dan menjadi sebuah rezim kebenaran (Foucault dalam Mills, 2004, h. 16).

Penelitian terkait representasi media atau penggunaan bahasa media dan seksualitas bukan hal baru. Misalnya, studi yang dilakukan Baker dan Levon (2016) tentang representasi hegemoni maskulinitas laki-laki di artikel-artikel harian cetak di Inggris tahun 2003-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa representasi maskulinitas dibentuk dan digolongkan berdasarkan kelas dan ras, serta diposisikan dalam relasi yang lebih luas pada ranah gender dan kekuasaan (Baker & Levon, 2016, h. 106). Penelitian lain dilakukan oleh Paredes (2019) dalam disertasinya mengenai kebencian homoseksual yang berasal dari gereja dan parlemen di Chile. Seperti halnya Baker dan Levon, studi Paredes ini juga menggunakan metode korpus linguistik (Paredes, 2019).

Sementara itu, penelitian ini adalah penelitian teks media yang mencoba melihat bagaimana diskursus ujaran kebencian pemerintah terhadap LGBT di media daring. Teks media dalam penelitian ini bersifat dialogis yang menyertakan pembacaan dari khalayak dengan mengasumsikan bahwa

khalayak akan menginterpretasikan dan memahami teks tersebut dengan cara yang subjektif (Downing, McQuail, Schlesinger, & Wartella, 2004, h. 106).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dua hal. Pertama, diskursus kebencian yang dilontarkan oleh pemerintah dalam isu LGBT. Kedua, media, melalui kata-kata, memiliki kekuasaan memberikan pengetahuan dengan nilai-nilai tertentu mengenai LGBT.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis diskursus kritis Sara Mills untuk membedah adanya stigma dan stereotip pada pemberitaan LGBT di media daring. Meskipun metode ini biasanya digunakan pada isu-isu perempuan dan berusaha membedah praktik diskriminasi dan peminggiran perempuan dalam media, namun metode ini masih relevan digunakan pada isu LGBT karena peminggiran dan diskriminasi juga dialami oleh LGBT di Indonesia.

Metode diskursus Sara Mills pada dasarnya melihat teks media pada dua posisi, yaitu posisi subjek dan objek, serta posisi penulis dan pembaca (Mills, 2004, h. 82). Eriyanto (2011, h. 211) menjelaskan kedua posisi tersebut seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2 Posisi pada Teks Media Versi Sara Mills

Tingkat	Hal yang Ingin Dilihat
Posisi Subjek-Objek	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana peristiwa dilihat dan dariacamata siapa peristiwa itu dilihat? - Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan? - Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan diri, gagasan, atau kehadirannya? - Bagaimana gagasannya ditampilkan oleh kelompok atau orang lain?
Posisi Penulis-Pembaca	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks? - Bagaimana pembaca memosisikan diri dalam teks yang ditampilkan? - Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi diri?

Sumber: Eriyanto (2011, h. 211)

Data penelitian ini berasal dari pemberitaan media daring selama tahun 2016 yang mengambil narasumber utama dari pemerintah atau mewakili lembaga pemerintahan, termasuk berbagai komisi negara. Empat media daring dipilih sebagai sumber data penelitian ini, yaitu *Kompas.com*, *Tempo.co*, *Viva.co.id*, dan *Republika.co.id*. Keempat media ini diambil karena masuk dalam daftar 50 besar peringkat media daring populer versi *Alexa.com*.

Studi ini memilih empat berita dari empat media daring tersebut. Pertama, berita berjudul “KPAI Tolak Aktivitas LGBT” (*Viva.co.id*, 10 Februari 2016). Kedua, berita berjudul “Anggota DPR: Indonesia tak Akan Pernah Akui LGBT” (*Republika.co.id*, 4 Februari 2016). Ketiga, berita berjudul “Menteri Yohana: Saya Menolak Keras Aksi LGBT, Awasi Anak-anak!” (*Kompas.com*, 15 Februari 2016). Keempat, berita berjudul “Menteri Pertahanan: LGBT Itu Bagian dari Proxy War” (*Tempo.co*, 23 Februari 2016).

Peneliti melihat pemberitaan dari segi diksi dalam tingkatan kata dan frasa (Greer, 2003, h. 184). Pemberitaan dilihat mulai dari judul hingga tubuh berita. Pada tingkatan kata, diambil satu sampai dua kata dan dilihat pengulangannya dalam berita tersebut. Sedangkan pada tingkatan frasa, diambil dari dua kata atau lebih. Studi yang dilakukan Greer (2003, h. 177) menunjukkan bahwa harian cetak cenderung menggunakan kata-kata yang sensasional.

Peneliti melihat posisi subjek-objek dengan mengacu pada siapa saja narasumber pemerintah yang dimintai

pendapat tentang LGBT. Bulan Februari 2016 dijadikan konteks berita karena pada bulan tersebut jumlah pemberitaan LGBT lebih tinggi dibanding bulan lain.

HASIL

Ujaran kebencian yang diarahkan kepada LGBT oleh empat media daring muncul melalui pilihan kata dan frasa. Pada pemberitaan mengenai LGBT di empat media yang menjadi objek penelitian, terdapat kata yang ditujukan untuk menarasikan LGBT. Kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang berkaitan dengan narasi identitas LGBT dalam berita tersebut. Ada kata yang berulang dan ada kata yang digunakan secara bersamaan di beberapa atau semua media daring.

Kata “Indonesia” adalah kata yang ada di setiap berita. Kata “LGBT” diulang antara empat sampai 14 kali. Kaitan antara LGBT dengan anak-anak banyak terdapat pada berita di *Kompas.com* dan *Viva.co.id*. *Kompas.com* menyebut 14 kali dan *Viva.co.id* menyebut delapan kali. Kata anak-anak pun disebut *Kompas.com* sebelas kali dan *Viva.co.id* menyebut lima kali (tabel 4). Penyebutan anak dan LGBT dilekatkan pada ranah diskursif lembaga yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Republika.co.id banyak memilih kata “agama”, “beragama”, dan “agama Islam” mengingat ideologi media ini didasarkan atas nilai-nilai agama Islam yang kuat. Nilai-nilai ini konsisten ketika digunakan untuk

memberitakan seksualitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, seperti identitas LGBT. Nilai-nilai Islam tersebut juga digunakan *Republika.co.id* ketika memberitakan Dede Oetomo (pendiri Yayasan GAYa Nusantara, sebuah organisasi nonprofit yang memperjuangkan hak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan *interseks/LGBTI*) sebagai calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2012 silam (Listiorini, Sarwono, & Hidayana, 2018, h. 49).

Kata lain yang muncul dalam pemberitaan adalah “HAM”. Kata tersebut muncul di dua media daring, yaitu *Viva.co.id* dan *Republika.co.id*. Konteks HAM ditolak bila dikaitkan dengan LGBT. Menolak LGBT dalam konteks HAM sebetulnya tidak hanya terjadi tahun 2016 saja. Hal yang kurang lebih sama terjadi ketika Dede Oetomo mencalonkan diri sebagai komisioner Komnas HAM tahun 2012. Ironisnya, penolakan tersebut justru disuarakan oleh salah satu komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, yang mengatakan bahwa LGBT bukan bagian dari HAM (Fitrat & Rini, 2013).

Tempo.co memuat berita yang berpandangan bahwa LGBT berbahaya karena sesungguhnya hal tersebut adalah perang *proxy*. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Kata-kata yang muncul dalam berita tersebut semuanya berhubungan dengan perihal keamanan, pertahanan, dan militer, seperti “perang”, “perang *proxy*”, “perang modern”, “militer”, “pasukan”, “bom atom”, “nuklir”, “hancur”, “senjata” dan “alutsista”.

Kata lain yang berhubungan dengan ranah tersebut juga muncul, seperti “diwaspadai”, “musuh”, “dideteksi”, “dilawan”, dan “menguasai”. Ranah kata serupa juga dimunculkan dalam pemberitaan di *Viva.co.id*, seperti “mengawasi”, “melindungi”, dan “mengimbau”. Kata “awas” dan “mengawasi” juga terdapat dalam pemberitaan yang menampilkan Menteri PPPA, Yohana Yambise. Kondisi “bahaya” dan “waspada” juga didapati dengan melihat diksi yang bernada negatif, seperti “mencari”, “mengintai”, “buruk”, “tak sesuai”, dan “menggelisahkan”.

Keempat media daring tersebut juga seolah-olah mengarahkan bahwa “bahaya” LGBT bisa menimpa masyarakat atau bangsa Indonesia yang di dalamnya ada “lingkungan”, “keluarga” dan “orang tua”. Di saat yang sama, masyarakat atau orang tua diharapkan “mengawasi” dan “melindungi” anak-anak mereka untuk menghadapi “bahaya” LGBT.

LGBT pun mendapat beragam julukan yang dilekatkan pada mereka, baik sebagai “individu”, “kelompok”, atau “kalangan”, maupun sebagai “paham” dan “pemikiran”. Keadaan “bahaya” ini juga dapat dilihat dari posisi LGBT sebagai “wabah” yang “penyebarannya” patut “diwaspadai”. Kondisi “bahaya” ini juga semakin tampak dalam frasa-frasa seperti terlihat pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan sikap pemerintah terhadap LGBT. Frasa dan kalimat yang diucapkan pemerintah dari empat media daring menunjukkan bahwa LGBT adalah entitas, paham, dan pemikiran yang berbahaya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kata “bahaya” menjadi signifikan karena dikaitkan dengan kata lain, seperti “penyakit”. Meskipun secara literer kata tersebut tidak ada, namun kata lain, seperti “wabah” dan frasa “gangguan kesehatan jiwa”, cukup memperjelas hal tersebut.

Pada Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993), homoseksualitas sudah tidak lagi dikategorikan sebagai gangguan jiwa, namun dalam pemberitaan di media daring, homoseksualitas masih dianggap sebagai penyakit berbahaya. Kata “bahaya” juga menjadi penting ketika LGBT dianggap sebagai sebuah gerakan yang “penyebarannya massal” dan “menyasar” atau “mengincar” anak-anak Indonesia. Kata “Indonesia” menjadi penting tidak hanya sebagai konteks tempat atau lokasi, tetapi juga

menunjukkan bahwa potensi “bahaya” LGBT akan meluas ke seluruh Indonesia.

Konsistensi struktur ujaran kebencian pemerintah ditunjukkan melalui pokok pikiran yang terkait isu LGBT pada berita daring. Hal tersebut terlihat pada tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa selain dianggap berbahaya, LGBT juga dianggap bertentangan dengan etika, norma, dan moral agama terutama agama Islam, seperti dilakukan *Republika.co.id*. Islam yang merupakan agama mayoritas digunakan sebagai salah satu klaim pemerintah melalui wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengatakan ketidaksetujuannya pada LGBT. Konsep “bahaya” dan “bertentangan” dengan etika, norma, dan moral agama ini yang dikatakan oleh pemerintah melalui media daring.

Tabel 3 Simpulan pada Level Frasa dan Kalimat

Level	<i>Viva.co.id</i>	<i>Republika.co.id</i>	<i>Kompas.com</i>	<i>Tempo.co</i>
Level Frasa	Aktivitas LGBT di publik dinilai berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.	LGBT tidak dapat dilegalkan.	LGBT mengintai anak-anak.	LGBT sebagai bagian dari perang <i>proxy</i> untuk menguasai suatu bangsa.
	Paham LGBT menimbulkan kegelisahan luar biasa pada level keluarga dan masyarakat.	Bertentangan dengan norma agama.	LGBT mengincar anak-anak.	LGBT bahaya.
	LGBT menimbulkan keresahan.	LGBT bertentangan dengan Islam.	LGBT merupakan wabah.	LGBT merupakan proses cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara.
	Gerakan dan penyebaran LGBT sangat massal di media massa.	Indonesia bukan Belanda.		
	LGBT sebagai orang dengan masalah kesehatan jiwa.	Meskipun orang dengan budaya luar mengatakan itu (LGBT) hak asasi manusia (HAM), namun untuk di Indonesia harus mempertimbangkan etika, moral, dan agama.		
	LGBT berpotensi gangguan jiwa.			

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 4 Judul dan Pokok Berita Ujaran Kebencian Pemerintah

Media	Judul	Pokok pikiran
<i>Viva.co.id</i>	KPAI Tolak Aktivitas LGBT.	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas LGBT di ruang publik dinilai bisa berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, salah satunya karena anggapan bahwa LGBT berpotensi masuk dalam kategori gangguan jiwa. - Penyebaran perilaku melalui media sosial dan televisi ini sangat meresahkan dan bisa dijadikan sebagai pembenaran terhadap perilaku LGBT di masyarakat. Oleh sebab itu harus dihentikan.
<i>Republika.co.id</i>	Anggota DPR: Indonesia Tak Akan Pernah Akui LGBT	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mendukung karena Indonesia memiliki pemikiran orang Timur, sehingga pemahaman lesbian, <i>gay</i>, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak dapat dilegalkan di Indonesia (menggunakan kata “saya”). - Sebagai anggota DPR, tidak akan pernah menyetujui legalitas LGBT karena bertentangan dengan etika, moral, norma agama Islam dan Indonesia adalah masyarakat Islam. - LGBT bukan HAM karena bertentangan dengan norma agama.
<i>Kompas.com</i>	Menteri Yohana: Saya Menolak Keras Aksi LGBT, Awasi Anak-anak!	<ul style="list-style-type: none"> - Menteri Yohana sangat menolak keras terhadap kegiatan LGBT yang melibatkan anak dan saat ini sudah mengincar anak-anak (menggunakan kata “saya”). - Bersama-sama kementerian lainnya akan melakukan tindakan untuk menghindari wabah LGBT pada anak. Salah satunya dengan turut mengawasi atau menutup situs berbau pornografi, khususnya mengenai LGBT.
<i>Tempo.co</i>	Menteri Pertahanan: LGBT Itu Bagian dari <i>Proxy War</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai fenomena kemunculan lesbian, <i>gay</i>, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia sebagai bagian dari <i>proxy war</i> untuk menguasai suatu bangsa, tanpa perlu mengirim pasukan militer. - LGBT berbahaya karena ada proses cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara.

Sumber: Olahan Peneliti

PEMBAHASAN

Posisi Subjek-Objek

Pada teks-teks media daring yang diteliti, wartawan memosisikan LGBT sebagai objek dan pihak-pihak lain yang kontra atau menolak LGBT sebagai subjek. Hal ini dapat dilihat pada semua narasumber yang memberi pernyataan tentang LGBT (tabel 6). LGBT menjadi entitas yang tidak memiliki suara karena tidak ada pernyataan apapun mewakili pihak LGBT dalam berita tersebut. Sedangkan narasumber yang dipilih dalam pemberitaan ini adalah pemerintah, yaitu anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, KPAI, Menteri PPPA, serta Menteri Pertahanan.

LGBT dalam posisi subjek-objek ini tidak diberi ruang untuk membela diri dengan ditiadakannya kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Posisi dominan ditempati oleh pemerintah yang diwakili oleh ketua KPAI (Ni'am Soleh), anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat (Irma Suryani Chaniago), Menteri PPPA, dan Menteri Pertahanan. Sedangkan narasumber nonpemerintah hanya diwakili oleh institusi *The Wahid Institute*. Narasumber yang mewakili LGBT dari pihak LGBT tidak ada.

Media, menurut De Jong (2006, h. 38), memiliki peran penting dalam mengonstruksi realitas tentang kelompok minoritas dari seleksi yang dilakukannya dan bagaimana

kelompok tersebut ditampilkan. Kata dan frasa yang dipilih oleh keempat media daring tersebut menunjukkan bahwa LGBT tidak pernah menjadi subjek—karena tidak disukai, dianggap salah, sakit, dan berbahaya—dalam diskursus tentang keberadaan mereka di media tahun 2016. Nilai *heteronormative* masyarakat yang dianggap sebagai hal yang “benar” dan “normal” (Gross, 1998, h. 88) dengan dibingkai nilai agama dianggap menjadi salah satu alasan pembenar bagi pemerintah untuk menyatakan bahwa kelompok *gay* dan lesbian adalah kelompok yang tidak wajar. Media daring tidak memberikan tempat bagi mereka untuk tampil dan bicara membela diri.

Posisi Penulis-Pembaca

Pada posisi penulis-pembaca, pemberitaan media daring tahun 2016 menempatkan masyarakat sebagai pembaca. Masyarakat adalah warga di seluruh Indonesia, termasuk keluarga dan orang tua, yang saat itu “sedang diimbau” agar mewaspadaai adanya “bahaya” dari “aktivitas LGBT”, “paham LGBT”, “individu LGBT”, “gaya hidup LGBT”, “kalangan LGBT”, “perilaku LGBT”, “aksi LGBT”, “pemahaman LGBT”, “pemikiran LGBT”, “komunitas LGBT”, “aksi LGBT”, “wabah LGBT”, dan “pendukung LGBT”. Kata “Indonesia” yang ada di setiap berita memperkuat posisi bahwa isu LGBT ini penting tidak hanya untuk beberapa kelompok masyarakat saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, keempat media daring menyetujui bahwa isu LGBT sebagai hal yang membahayakan masyarakat Indonesia. Meskipun kata “bahaya” hanya

ada di satu media daring, yakni *Tempo.co*, namun media lain mengeluarkan kata-kata yang bernada serupa, seperti “buruk”, “tak sesuai”, “kegelisahan luar biasa”, dan “meresahkan” (*Viva.co.id*); “bermasalah” (*Republika.co.id*); “kekhawatiran”, “waswas”, dan “mesum” (*Kompas.com*). Kata “mesum” biasa digunakan untuk membicarakan seksualitas yang dianggap “tidak pantas” dan “porno”. Apabila kata “mesum” ditambahkan dengan kata “LGBT” dan dicari dalam mesin pencari *Google*, maka muncul banyak artikel berita yang mengetengahkan dua hal tersebut. Misalnya, pada berita daring berjudul “Delapan Pria Dibekuk saat Mesum di Surabaya” (Rosyid, 2016), kata “mesum” dikaitkan dengan identitas pasangan yang “dicurigai” sebagai *gay*. Contoh lain ada pada berita berjudul “Heboh *Games* Mesum LGBT di Medsos Bikin Resah Warga” (Rosyid, 2016). Berita tersebut memuat adanya tindakan-tindakan yang dianggap tidak pantas dimainkan dalam permainan anak-anak.

Konsep LGBT sebagai bahaya juga dikuatkan dengan narasumber yang “berkuasa” atas diskursus keamanan nasional, yaitu Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Demikian pula ketika LGBT dianggap “berbahaya” bagi anak-anak, maka media mengambil narasumber pemerintah yang dianggap relevan dengan isu anak, yaitu KPAI dan kementerian PPPA yang diwakili langsung oleh komisioner dan menterinya. Hal yang sama juga terjadi ketika mengambil narasumber dari DPR yang dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Analisis di atas menunjukkan bahwa LGBT justru tidak memiliki kekuatan yang mewakili mereka di media. Hal ini senada dengan Gross (dalam Meyer, 2013, h. 380) yang menyatakan bahwa “representasi” dalam “realitas” yang dimediasi oleh budaya massa adalah kekuatan itu sendiri. Tentu saja hal tersebut adalah kasus yang tidak mewakili status dari kelompok yang tidak berdaya dan tidak memiliki bahan atau basis kekuatan yang signifikan.

Sementara itu, peraturan dalam Surat Edaran Kapolri (SE/6/X/2015) tentang Penanganan Ujaran Kebencian menyatakan bahwa ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, termasuk orientasi seksual (poin 2 (g) no. 11). Berdasarkan peraturan tersebut, semua ujaran pemerintah terkait LGBT di bulan Februari 2016 termasuk ujaran kebencian. Hal ini tampak pada diksi maupun frasa kalimat yang semuanya bernada negatif dan mengindikasikan situasi “bahaya”. Dengan kata lain, melalui media, pemerintah Indonesia menyatakan kepada masyarakat Indonesia bahwa LGBT adalah bahaya yang harus diwaspadai dengan mengasumsikan masyarakat Indonesia tidak banyak mengetahui atau memahami LGBT. Isu moral menjadi penting dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya untuk menjaga stabilitas negara.

Diskursus Pemberitaan LGBT di Media Daring

Diskursus LGBT di keempat media daring tersebut menempatkan LGBT di dua posisi. Pertama, LGBT diposisikan

sebagai pihak yang tidak dominan atau *submissive* dan hanya menjadi objek media karena keberadaannya dianggap sebagai hal yang “tidak normal”, “tidak umum”, “menyimpang”, bahkan “berbahaya” dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya konservatif terkait topik seksualitas (Aspinall, 2014). Hal ini juga berlaku untuk media daring, sebagaimana media pada umumnya, yang masih menganggap isu LGBT adalah isu yang tidak umum atau asing hingga muncul adanya pelembagaan homofobia (UNDP-USAID, 2014, h. 39). Hal tersebut memicu media untuk meletakkan LGBT sebagai isu moral yang bertumpu pada *ketubuhan* perempuan dan moralitas *ketubuhan* yang cenderung *heteronormative* di mana orientasi seksual minoritas seperti *gay* dan *lesbian* dianggap tidak wajar (Gross, 1998, h. 89).

Kedua, LGBT dimarginalkan oleh media melalui posisi objek yang secara representatif tidak memiliki kekuasaan yang dinarasikan melalui bahasa di media. Bahasa menjadi elemen penting dalam diskursus pemberitaan tentang LGBT di Indonesia karena bahasa membentuk *site of struggle* atau arena pertarungan (Mills, 2004, h. 38). Pertarungan yang dimaksud adalah pertarungan antara ideologi *heteronormative* biner dengan *non-heteronormative* biner (Turner, dkk., 2018, h. 15). Posisi pemerintah sebagai subjek yang berkuasa dan dominatif dalam pemberitaan menjadikan LGBT sebagai objek yang tidak berdaya. Media, dengan kekuatan produksi yang dimilikinya, seperti jurnalis, reporter, dan editor,

menjadi agensi yang mampu memproduksi “sebuah pengetahuan” yang bermakna. Keempat media daring tersebut tidak hanya dimaknai LGBT sebagai hal yang berbahaya bagi pembaca, namun menunjukkan marginalisasi identitas tersebut melalui relasi kuasa dalam pemberitaan (Mills, 2004, h. 112).

Dant (1991, h. 133) mengemukakan bahwa pengetahuan sosial yang dimiliki bersama eksis dalam bentuk diskursus, namun pengetahuan tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah tindakan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pemilihan kata, sudut pandang berita, dan narasumber, sehingga proses pembentukan pengetahuan mengenai LGBT bersumber dari narasumber-narasumber yang tidak memiliki keberpihakan pada LGBT. Ujaran kebencian yang dilontarkan pejabat pemerintah di Indonesia terhadap LGBT melalui media pada akhirnya bukan sebatas pilihan personal, namun berubah menjadi diskursus yang politis.

SIMPULAN

Media daring menjadi ajang pertarungan diskursus dalam memberikan pengetahuan tentang LGBT. Pendekatan diskursus Sara Mills memberikan penjelasan bahwa LGBT tidak pernah menjadi subjek media, melainkan objek yang dipinggirkan. Pemerintah menjadi subjek utama yang berkuasa dan mendominasi diskursus tentang LGBT.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kecenderungan pemberitaan media daring. Pertama, pemberitaan media daring tidak

mendukung komunitas LGBT. Pemberitaan berfokus pada penolakan dan menjadikan LGBT sebagai entitas yang berbahaya. Kedua, media daring menghilangkan rasa aman. Media lebih banyak menciptakan rasa takut atau kengerian, baik terhadap komunitas LGBT, maupun terhadap khalayak luas. Ketiga, media daring berpotensi tidak hanya menciptakan kebencian terhadap komunitas LGBT, tetapi juga menguatkan homofobia di masyarakat melalui judul dan pilihan kata yang negatif tentang LGBT.

Penelitian ini bisa dikembangkan dengan jumlah data yang lebih besar, baik dari jumlah data berita media (satu atau beberapa media daring), maupun jumlah tahunnya. Selain itu, metode analisis data bisa dikembangkan dengan menggunakan korpus linguistik, satu metode yang tengah dikembangkan untuk penelitian terkait bahasa media, linguistik, dan analisis diskursus kritis. Hal ini tentunya akan memberikan pengayaan terhadap kajian pada disiplin Ilmu Komunikasi, terutama mengenai media, dan seksualitas. Pengembangan ke arah yang diskursif dan ideologis dengan mempertimbangkan aspek ekonomi media dan pergerakan ideologi agama arus utama juga menjadi hal yang disarankan untuk dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwie, T., Anthony, Larasati, E. D., & Pamungkas, W. W. (2007). Awas, pemangsa bocah. *www.gatra.com*. <<http://arsip.gatra.com/2007-07-16/majalah/artikel.php?pil=23&id=106303>>
- Alwie, T., Barus, D. M., Taolin, A. U., & Sujatmiko, A. (2008). Pengakuan ryan menguat

- kesalahan. *www.gatra.com*. <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=118270>
- Arthurs, J. (2004). *Television and sexuality*. London, United Kingdom: McGraw-Hill Education.
- Aspinall, E. (2014). *Sex, lies and politicians*. <<https://www.insideindonesia.org/sex-lies-and-politicians>>
- Awigra, D. (2016). Implikasi ujaran kebencian pejabat publik pada LGBT. *www.sejuk.org*. <<http://sejuk.org/2016/02/01/implikasi-ujaran-kebencian-pejabat-publik-pada-lgbt/>>
- Baker, P., & Levon, E. (2016). 'That's what i call a man': Representations of racialized and classed masculinities in the UK print media. *Gender and Language*, 10(1), 106-139.
- Bastian, A. Q. (2016). Kominfo blokir aplikasi grindr, blued, dan boyahoy. *www.rappler.com*. <<https://www.rappler.com/indonesia/146413-kominfo-blokir-aplikasi-grindr-lgbt>>
- Boellstorff, T. (2016). *Against state straightism: Five principles for including LGBT Indonesians*. <<https://www.e-ir.info/2016/03/21/against-state-straightism-five-principles-for-including-lgbt-indonesians/>>
- Dant, T. (1991). *Knowledge, ideology and discourse*. London, United Kingdom: Routledge.
- De Jong, M. J. (2006). From invisibility to subversion: Lesbian and gay representation in the us news media during the 1950s. Dalam Laura Castañeda dan S. Campbell (eds), *News and sexuality: Media portraits of diversity* (h. 37-52). Thousand Oak, CA: Sage.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III. (1993). Jakarta, Indonesia: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Di Djakarta Terdapat 15.000 Bantji. (1968, Agustus 4). *Harian Kompas*.
- Downing, J. D. H., McQuail, D., Schlesinger, P., & Wartella, E. (2004). *The sage handbook of media studies*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Eriyanto. (2011). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta, Indonesia: LKiS.
- Fitrat, I. & Rini, C. L. (2013). Posisi komnas HAM soal LGBT masih tanda tanya. *www.republika.co.id*. <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/02/mpalx5-posisi-komnas-ham-soal-lgbt-masih-tanda-tanya>>
- Garland, J., & Chakraborti, N. (2012). Divided by a common concept? Assessing the implications of different conceptualizations of hate crime in the European Union. *European Journal of Criminology*, 9(1), 38-51.
- Greer, C. (2003). *Sex crime and the media: Sex offending and the press in a divided society*. Portland, OR: Willan Publishing.
- Gross, L. (1998). Minorities, majorities and the media. Dalam Tamar Liebes & J. Curran. *Media, ritual and identity* (h. 87-102). London, UK: Routledge.
- Gunter, B. (2001). *Media sex, what are the issues*. New Jersey, NJ: Lawrence Elbaum Associates.
- Halim, H., & Harsaputra, I. (2016). Ulema Council to ban Muslims from LGBT advocacy. *www.thejakartapost.com*. <<https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/09/ulema-council-ban-muslims-lgbt-advocacy.html>>
- Hall, S. (1992). The west and the rest: Discourse and power. Dalam Stuart Hall & B. Gieben (eds), *Formations of modernity* (h. 275-332). Cambridge, UK: Polite Press and the Open University.
- Herd, G.H. (2009). Introduction: Moral Panics, Sexual Rights, and Cultural Anger. Dalam Herdt, G.H. (ed.), *Moral panics, sex panics: Fear and fight over sexual rights*. New York, NY: New York University Press.
- Hill, D. T. & Sen, K. (2005). *The internet in Indonesia's new democracy*. London, UK: Routledge.
- Human Right Watch. (2016). *Permainan politik ini menghancurkan hidup kami: Kelompok LGBT Indonesia dalam ancaman* (Edisi Indonesia). Amerika Serikat: Human Right Watch. <https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0816bahasaindonesia_web_2.pdf>

- Listiorini, D., & Davies, S. G. (2017). *Online dating apps blocked*. <<https://www.insideindonesia.org/online-dating-apps-blocked>>
- Listiorini, D., Sarwono, B., & Hidayana, I. M. (2018). *The framing of gay candidate for human right commissioner in the religious-based Indonesian online portals*. Paper presented at The 10th International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Mayr, A. (2008). *Language and power: An introduction to institutional discourse*. New York, NY: Continuum International Publishing Group.
- Meyer, M. D. E. (2013). Media, sexuality and identity: Thoughts on the role text, audience and production play in cultural discourse. *Sexuality & Culture*, 17, 379–383.
- Mills, S. (2004). *Discourse*. London, UK: Routledge.
- Novia, D. R. M., & Jamil, A. I. (2016). LGBT ancaman serius. www.republika.co.id. <<https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/01/24/01gi281-lgbt-ancaman-serius>>
- Oktara, D. (2016). Mahasiswa beri konseling LGBT, begini respons UI. www.tempo.co. <<https://nasional.tempo.co/read/738146/mahasiswa-beri-konseling-lgbt-begini-respons-ui/full&view=ok>>
- Paredes, D. S. (2019). *Shades of hate: Representations around homosexuality in Chilean church and parliamentary discourse (2005-2015)*. Disertasi. Lancaster University, Lancaster, UK.
- Perry, B. (2001). *In the name of hate: Understanding hate crimes*. New York, NY: Routledge.
- Pullen, C. (2012). *Gay identity, new storytelling and the media*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Rosyid, M. K. (2016). Delapan pria dibekuk saat mesum di Surabaya. www.medcom.id. <<https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa/zNAXPrvK-delapan-pria-dibekuk-saat-mesum-di-surabaya>>
- Satria, L. & Purwadi, D. (2016). Republika disomasi soal LGBT. www.republika.co.id. <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/03/01z30f257-republika-disomasi-soal-lgbt>>
- Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). (2015). Jakarta, Indonesia: Kepolisian Republik Indonesia.
- Suryakusuma, J. (2016). View point: State hysteria: Leading the nation with homophobia. www.thejakartapost.com. <<https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/24/view-point-state-hysteria-leading-nation-with-homophobia.html>>
- Sutrisno, E. D. (2016). Ketua MPR: Kelompok LGBT harus dilarang masuk kampus! www.detik.com. <<https://news.detik.com/berita/3125816/ketua-mpr-kelompok-lgbt-harus-dilarang-masuk-kampus>>
- Tettey, W. J. (2016). Homosexuality, moral panic, and politicized homophobia in Ghana: Interrogating discourses of moral entrepreneurship in Ghanaian media. *Communication, Culture & Critique*, 9(1), 86-106.
- Turner, G., Mills, S., Van Der Bom, I., Coffey-Glover, L., Paterson, L. L., & Jones, L. (2018). Opposition as victimhood in newspaper debates about same-sex marriage. *Discourse & Society*, 29(2), 180-197.
- UNDP-USAID. (2014). *Being LGBT in Asia: Indonesia country report*. Bangkok, Thailand: UNDP Asia-Pacific.
- Wasono, H. T., Ishomudin, Goretti, M., & Eni S. (2012). Pengakuan mujiyanto pembunuh asal nganjuk. www.tempo.co. <<https://nasional.tempo.co/read/384356/pengakuan-mujiyanto-pembunuh-asal-nganjuk/full&view=ok>>